

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2004 – 2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar rakyat mendapat peningkatan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan menjangkau pelayanan pendidikan adalah dengan cara mengadakan suatu program pemberian dana terhadap pendidikan dasar Sembilan tahun. Program pemberian dana tersebut adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih dikenal dengan nama (BOS). Menurut Duha (2015:3) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar Sembilan tahun . BOS merupakan implementasi dari Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan untuk dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang dipenuhinya tujuan pengendalian. Pelaksanaan pengendalian intern sekolah atau perusahaan nirlaba tersebut harus berdasarkan prosedur, maksudnya adalah apakah pelaksanaan pengendalian internnya efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dengan dilakukannya evaluasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap keamanan sekolah atau perusahaan nirlaba, keandalan serta keakuratan informasi yang dihasilkan (Duha:2015:5). Adapun kriteria dari pengendalian intern, yaitu (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (IAI:2001:319).

Keandalan pelaporan keuangan dimaksudkan bahwa manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan bagi investor, auditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Efektivitas dan efisiensi operasi dalam hal ini, pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong sumber daya secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber milik perusahaan, sehingga dapat dicegah kegiatan yang tidak perlu dan pemborosan dari semua aspek organisasi.

Keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku artinya pengendalian internal merupakan alat untuk memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan yang berlaku telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan diikuti oleh seluruh karyawan perusahaan.

Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian intern secara baik dan benar pada suatu perusahaan, maka sekolah atau perusahaan nirlaba tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko. Menurut Wilkison (1996) seperti yang telah dikutip oleh Akbar (2012:22) mengungkapkan bahwa :”jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi lebih kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Di sisi lain, tanpa pengendalian internal, kondisi yang membawa dampak negative bagi sekolah atau perusahaan nirlaba mungkin akan terjadi, seperti kesalahan pengambilan keputusan, inefisiensi biaya, kehilangan aset, terhentinya kegiatan usaha maupun karena sanksi “

Sekolah Dasar Negeri Bulurejo memiliki sebuah sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan dana BOS yang ditunjukkan dari prosedur-prosedur dan adanya sistem otorisasi dari bendahara sekolah kepada kepala sekolah. Selain itu adanya pengawasan terhadap penggunaan dana BOS sesuai dengan pembiayaan yang tertuang di dalam Juknis BOS. Pada saat ini penyaluran dana BOS dari pusat tidak tepat waktu sehingga untuk sementara waktu semua pembelanjaan SDN Bulurejo diambilkan dari dana sukarela yang didapat dari

wali murid. Kemudian jika dana BOS sudah keluar, dana sukarela yang telah dipakai sebelumnya dikembalikan lagi sesuai dengan pembelanjaan yang digunakan. Pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo, pengelolaan dana BOS tidak terlalu melibatkan Komite Sekolah. Komite hanya berperan pada saat penyusunan RAPBS, dan pada pelaksanaan dana BOS evaluasi penggunaan dana ada yang tidak sesuai dengan RAPBS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Bulurejo sudah efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pelaksanaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo Kecamatan Bulukerto tahun 2013 - 2015?
2. Apakah sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo Kecamatan Bulukerto tahun 2013 – 2015 sudah berjalan dengan baik ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo Kecamatan Bulukerto tahun 2013 - 2015.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bulurejo Kecamatan Bulukerto tahun 2013 – 2015 sudah berjalan dengan baik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang baik untuk peneliti dan semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperluas wawasan dan memperdalam ilmu tentang sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada sekolah dasar.

2. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam memeriksa kembali sistem pengendalian internnya apakah sudah efektif.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menganalisa programnya dan menjadi bahan acuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

4. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bagian kekayaan intelektual yang dapat digunakan untuk bahan informasi mengenai teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada sekolah dasar.

5. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai sistem pengendalian intern pelaksanaan dana BOS pada sekolah dasar.

